

Jalin Kemitraan Kembangkan Kadamba



Sebanyak 21 orang warga Malaysia, 16 diantaranya investor, datang ke Cirebon, Jawa Barat, pada pertengahan Juni 2010, menandatangani kerjasama dengan PT Serayu Kayuindo untuk mengembangkan jabon di seluruh pelosok Malaysia. Sebagai langkah awal, seluas 80 hektar lahan di kawasan Gambang Science Park akan ditanami jabon untuk percontohan.

Jauh-jauh dari Malaysia, rombongan berjumlah 21 orang itu hanya mencari tandatangan. Mereka datang ke PT Serayu Makmur Kayuindo di Cirebon, Jawa Barat. Di pabrik kayu itulah kesepakatan penanaman jabon *Antocephalus cadamba* di Malaysia seluas 80.000 hektar ditandatangani pada pertengahan Juni 2010.

Penandatanganan itu menurut Hasan, direktur PT Serayu Makmur Kayuindo (SMK) untuk yang kesekian ratus kalinya dilakukan. PT SMK yang kini memiliki 3 pabrik plywood di Lumajang (Jawa Timur), Banjarnegara (Jawa Tengah), dan Cirebon (Jawa Barat) memang mengharapkan pasokan kayu dari sistem kemitraan. "Kami butuh kayu jabon maupun sengon dalam jumlah banyak untuk pabrik yang sudah ada. Belum lagi beberapa pabrik yang direncanakan akan dibangun," kata Hasan. Berdasarkan kapasitas pabrik, selama ini kebutuhan bahan baku baru terpenuhi 60%. Itu pun harus pontang-panting mendatangkan kayu dari seluruh pelosok Jawa Barat.

Berbagai cara ditempuh SMK untuk menjamin ketersediaan pasokan kayu sebagai bahan baku kayu lapis. Mulai dari pemberian bibit secara cuma-cuma kepada masyarakat dan pembelian kayu milik perorangan maupun instansi pemerintah atau swasta di sekitar lokasi pabrik serta di luar daerah. Namun, kebutuhan bahan baku yang begitu besar menuntut peningkatan jumlah areal penanaman yang pesat. "Kami kembangkan sistem kemitraan, agar calon

pekebun tidak menanggung risiko pasar dan merasa yakin atas keuntungan yang kelak diperoleh dari menanam jabon atau sengan," kata Priyono, PT SMK.

17-JUTA POHON

Dari hasil kemitraan yang dijalankan sejak 2008, SMK hingga kini sudah menanam tidak kurang dari 17-juta atau setara 17.000 hektar jabon di 8 provinsi. Sebut saja di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa



Timur, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Di Jawa Barat yang meliputi lahan seluas 800 ha tersebar di Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Ciamis, sampai Tasikmalaya. “Kami tidak membatasi lokasi areal penanaman. Semua lahan entah kebun, lingkungan perumahan, dan perkantoran yang memungkinkan, kami tanami,” ungkap Hasan.

Sebagai contoh PT SMK pada Februari 2010 menanam 2.000 bibit jati di sekeliling kantor Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) di daerah Kelapagading, Jakarta Utara. “Pertumbuhan jabon sangat cepat, dalam 3 bulan tinggi tanaman mencapai 2,5—3 m,” kata Laksamana Pertama Kingkin

Di tengah kota, di Kelapagading, Jakarta Utara, 2.000 jabon Antocephalus cadamba setinggi 2—3 m menghijaukan areal perkantoran Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. “Kebun” jabon yang digagas dengan sistem kemitraan antara Laksamana Pertama Kingkin Suroso SE, Danpuspomal, dan Hasan, direktur PT Serayu Makmur Kayuindo, terwujud pada Februari 2010.

Suroso SE, Danpuspomal yang menggagas penanaman jabon. Makanya pria kelahiran 53 tahun itu akan mengoptimalkan pemanfaatan “pekarangan” kantor yang total luasannya mencapai 5 hektar. Kingkin memilih jabon karena selain cepat tumbuh, sosoknya eksotis: daunnya lebar bergelombang, hijau tua, dan batangnya lurus. Lalu, dari segi ekonomis juga, jabon cukup bagus. “Harganya akan semakin meningkat,” imbuh Kingkin.

Soal pasar kayu lapis tidak khawatir karena banyak perusahaan *playwood* yang butuh pasokan. Apalagi, “Pihak SMK selaku mitra bersedia menampung dengan harga pasar yang berlaku saat panen,” katanya. Puspomal memang menjalin kemitraan dengan PT SMK, sehingga mulai dari persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, dan pemanenan kelak, dilakukan oleh SMK. Pendek kata Puspomal tinggal ongkang-ongkang kaki, tapi hasilnya: lingkungan menjadi hijau dan uang datang sendiri.

Itu pula yang terjadi di lingkungan perumahan Perumnas di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Di lahan seluas 1,4 hektar telah tertanam 876 pohon jabon melalui kemitraan dengan SMK. Jabon yang ditanam 1,5 tahun lalu itu tingginya mencapai 3—4 m dengan diameter batang 10—15 cm. “Jabon tumbuh subur, meski tanah





di sini kualitasnya rendah: tekstur tanah lebih besar daripada butiran-butiran pasir dan berair payau,” kata Priyono. Namun dengan teknologi budidaya yang dimiliki perusahaan mitra, kendala lahan marginal bisa diatasi. Lahan milik salah satu warga perumahan itu kini menyerupai hutan kota.

Laksamana Pertama Kingkin Suroso SE berniat totalitas tanami jabon di lahan Puspomal seluas 5 ha yang tersisa. Alasannya, selain menyerap polutan, dalam 4—5 tahun ke depan setiap pohon menghasilkan kayu bernilai ekonomis tinggi sekitar 0,45 m³ dengan harga Rp1-juta/m³.

MARAK

Pola kemitraan penanaman jabon dan sengon juga dikembangkan perusahaan kayu lain. PT Kutai Timber Indonesia yang mulai intensif menanam jabon pada 2006, kini telah bermitra dengan 30.000-an petani. “Sekarang, lahan yang sudah ditanami mencapai 4.000 hektar,” kata Habib Qodir Al Hamid, koordinator Kemitraan dan Pembina Koperasi Alas Mandiri. Itu karena PT KTI mengakomodasi keinginan semua calon pekebun dengan menetapkan persyaratan yang sangat sederhana untuk bermitra. Misalnya, luas lahan tidak dibatasi, bisa mulai dari 100 m² hingga berpuluh-puluh hektar.

Prosesnya juga sangat gampang, pemilik lahan cukup menyerahkan fotokopi KTP dan surat pajak tanah kepada PT KTI. Setelah penandatanganan kontrak kemitraan, PT KTI memberikan bibit dan dukungan teknis budidaya. “Kalau ada serangan hama dan penyakit, kami turun tangan untuk mengatasinya,” lanjut Habib. Ketika tiba saat panen KTI akan mengambil semua hasilnya dengan harga pembelian sesuai harga pasar.

Habib menilai pola kemitraan seperti ini sukses dilakukan pada sengon. Terbukti di wilayah penanaman, kondisi lingkungan lahan kritis makin membaik dan perputaran roda ekonomi pun terus bergulir semakin kencang.



Perakaran jabon tidak merusak bangunan karena dalam dan menghujam ke dalam tanah. Sementara daun meskipun tunggal tapi berdaun lebar seukuran daun jati sehingga memberikan keteduhan.





Lahan tidur di perumahan di Kelurahan Harjamukti yang kurang subur dimanfaatkan untuk ditanami jabon. Ada 876 pohon di lahan seluas 1,4 hektar. Lahan yang dianggap kurang subur itu dengan teknologi yang dipunyai perusahaan mitra membuat pertumbuhan jabon optimal: umur 1,5 tahun tingginya mencapai 4 m dengan diameter batang 10—15 cm.

la mencontohkan di Kecamatan Krucil, Tritis, Jawa Timur, yang menjadi pusat pengembangan sengon, perputaran uang hasil perdagangan sengon mencapai Rp5-miliar per tahun. Berkah tersebut salah satunya tercermin dari banyaknya warga yang menunaikan ibadah haji. "Setiap tahun rata-rata 50 orang berangkat haji," kata Habib.

CV Jabon Kendal tak ketinggalan. Ardha Primatopan, pimpinannya, merintis kemitraan berawal dari seorang teman yang minta dicarikan lahan untuk menanam jabon. "Tidak ada warga desa yang tertarik menjual lahan. Mereka bersedia lahannya ditanami jabon dengan sistem bagi hasil," kata Ardha yang mulai tergiur mengebunkan jabon pada pertengahan 2009. Sebelumnya, pada akhir 2008, Ardha menanam 17.000 bibit sengon di lahan milik keluarga seluas 17 hektar. "Di Temanggung dan Wonosobo (keduanya di Jawa Tengah, red) sengon banyak terserang karat tumor," katanya.

PT Serayu Makmur Kayuindo, memproduksi bibit sendiri untuk mitranya. Kini sudah tersebar dan tertanam sebanyak 17-juta bibit di 8 provinsi antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.





Jarak dari kebun, kondisi jalan, tingkat kesuburan lahan menjadi penentu persentase bagi hasil antara perusahaan kayu dengan pemilik lahan. Persentasenya 70:30, 60:40, atau 50:50. Sebagai contoh jika lahanya berjarak sekitar 10—20 km dari pabrik dengan kondisi jalan baik dan lahan subur, persentase bagi hasil adalah 50:50.

PAYUNG HUKUM

Jabon menjadi pilihan Ardha untuk mengantisipasi sengon yang rawan terserang karat tumor akibat cendawan *Uromygladium tepperianum*. Maka dengan keyakinan jabon mempunyai banyak kelebihan: tumbuh cepat, batang lurus, nilai ekonomis tinggi, di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah, ditanam 17.000 bibit jabon di lahan 17 hektar. Tepat 3 bulan pascapenanaman, pada Januari 2010, perusahaan kayu lapis menandatangani kontrak perjanjian untuk mengambil hasil panen kayu jabon. “PT Sekawan Sumber Sejahtera di Temanggung bersedia menampung pasokan kayu bulat jabon dengan harga sesuai pasaran,” tutur Ardha.

Akses pasar itu dimanfaatkan pria kelahiran Kendal itu dengan membuka kemitraan di hulu. Bersama pekebun dari Semarang, Jepara, Jakarta, dan Aceh ada 75 hektar tanaman jabon yang dikelola CV Jabon Kendal sebagai lahan kemitraan. “Untuk musim tanam 2010—2011, lahan kemitraan seluas 15 hektar tengah dipersiapkan. Itu belum termasuk 20 calon pekebun yang luasannya belum ditentukan,” ujar Dwi Setianto, bagian pemasaran CV Jabon Kendal.

Dwi mengungkap seorang calon pekebun minimal mempunyai modal Rp20-juta untuk penanaman jabon seluas 1 ha. “Modal itu dipakai untuk pembelian bibit, penanaman, dan pemupukan yang dikelola oleh CV Jabon Kendal. Sementara perawatan dan penanggung pajak tanah ialah pemilik lahan,” katanya. Hasil panen diserahkan kepada CV Jabon Kendal yang akan menjualnya ke PT Sekawan Sumber Sejahtera (SSS). “SSS menerima jabon franco pabrik dengan harga saat ini Rp980.000 per m³. Sengon hanya Rp720.000/m³,” tambah Dwi.



Calon pekebun pun menanam jabon dengan pola kemitraan karena alasan kepastian pasar. Alasannya, meski harga belum ditentukan, tapi dengan pasar yang jelas, pekebun terhindar dari risiko kerugian. Toh, kecenderungan harga kayu dari tahun ke tahun terus meningkat. Hasan memprediksi 4—5 tahun ke depan harga kayu jabon bisa mencapai Rp1,2-juta/m³ karena kualitas kayunya lebih baik daripada sengon.

Wajar kalau para pengusaha kayu ramai-ramai mengembangkan pola kemitraan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Terhitung ada 7 perusahaan yang sudah eksis melakukannya, yakni :

- PT SGS Group berlokasi di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
- PT Mangole Timber Producer di Maluku Utara
- PT Navatani di Kalimantan Selatan
- PT Kutai Timber Indonesia di Jawa Timur
- PT Semeru Makmur Kayuusa di Jawa Timur
- PT Serayu Makmur Kayuindo di Jawa Barat

Oleh karena itu, melihat maraknya pola kemitraan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Kementerian Kehutanan, tidak tinggal diam. Demi memayungi keamanan dan kenyamanan para pekebun dari mitra kerjanya, kementerian kehutanan berencana meluncurkan

Pola kemitraan pada jabon persis sengon yang dianggap sukses karena berhasil menghijaukan tanah-tanah marginal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan kontinuitas pasokan bahan kayu lapis terjaga. Itu semua karena prasyarat dan prosedur untuk menjalin kemitraan relatif mudah



beberapa kebijakan. “Jangan sampai kasus kemitraan dalam bentuk investasi yang *booming* pada 2000-an, terulang saat ini di komoditas kehutanan,” ucap Ir Indri Indriastuti, MM, direktur jenderal RLPS.

BAGI HASIL

Pola kemitraan yang dikembangkan setiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan calon investor cukup punya lahan, sementara bibit, perawatan, dan pemanenan ditangani perusahaan. Ada juga yang menetapkan calon pekebun cukup memiliki modal, masalah penyediaan tanah, bibit dan sarana produksi, serta perawatan hingga panen menjadi tanggung jawab perusahaan. “Pada dasarnya kami tidak ingin memberatkan calon mitra, sehingga sistem bagi hasil pun nilainya berbeda-beda. Misal 70:30, 60:40, dan 50:50, tergantung besarnya input yang disertakan calon pekebun,” kata Hasan.

Besarnya persentase bagi hasil menurut Hasan ditentukan oleh beberapa faktor: jarak dari kebun ke pabrik, tingkat kesuburan lahan, dan input yang disertakan calon pekebun. Semua faktor itu berpengaruh pada besarnya biaya yang harus dipikul perusahaan. Sebagai contoh semakin jauh lokasi kebun dari pabrik dan kondisi jalan rusak, biaya pengangkutan kayu saat panen



Sebelum bermitra, tanah diperiksa di laboratorium untuk menentukan tambahan input (berupa pupuk kandang atau dolomit) yang diperlukan agar syarat tumbuh jabon terpenuhi. Jika perlu, tanah penutup lubang tanam didatangkan dari tempat lain sekadar untuk memacu pertumbuhan awal jabon. Setelah perakaran kuat, jabon dapat tumbuh baik di berbagai jenis tanah.

pasti lebih besar. Konsekuensinya pengusaha menetapkan bagian lebih besar untuk menutup biaya pengangkutan. Demikian jika lahan kurang subur yang menyebabkan perusahaan menambahkan input produksi lebih banyak, maka porsi bagi hasil pekebun lebih kecil ketimbang pengusaha.

Berdasarkan pengamatan Dr Nandang Prihadi, dari Institut Pertanian Bogor (IPB), secara garis besar ada 3 model kemitraan dalam investasi kayu,



Pengusaha sebagai mitra tak membatasi lokasi penanaman, selama transportasi pengangkutan hasil terjamin. Lahan yang miskin hara pun bisa disulap menjadi subur untuk pertanaman jabon. Sebagai contoh, hanya berjarak ratusan meter dari bibir pantai, jabon tumbuh subur di pesisir pantai utara Cirebon, Jawa Barat. Salinitas dan pH yang terlalu rendah dimanipulasi dengan penambahan dolomit dan pupuk kandang.

termasuk jabon, di Pulau Jawa. Yang pertama ialah model informal. Industri kayu membagi-bagi bibit kepada pemilik lahan atau instansi secara gratis. Pemilik lahan yang menanam, merawat, hingga panen. Pemilik lahan boleh menjual hasil panen kepada siapa pun. Kelemahannya tak ada jaminan pasar dan tak ada bimbingan teknis budidaya bagi pemilik lahan. Industri kayu yang membagikan bibit gratis sebetulnya tidak rugi. Mereka bisa memperoleh keuntungan dengan mengklaim adanya penanaman kayu rakyat di wilayah operasi, sehingga izin usaha terus diberikan.

Pola kedua ialah industri kayu membagikan bibit, melakukan pendampingan, sebagian melakukan perawatan, hingga membantu panen. Beberapa bahkan memberi premium price (harga di atas harga pasar, **red**) dan kredit tunda tebang (harga tambahan karena menunda tebang, **red**). Kisaran bagi hasil pada pola kedua 20—50% untuk industri kayu dan 50—80% untuk pemilik tanah. “Itu tergantung besarnya input yang diberikan setiap pihak. Namun, yang umum, menurut Nandang, 20:80 dan 10:90 untuk industri dan pemilik lahan.

Pola ketiga mirip dengan pola kedua, hanya dilakukan pada tanah negara atau instansi. “Pada pola terakhir kesepakatan antara pemilik konsesi lahan negara dengan industri, bahkan investor bila ada,” tambah Nandang. Menurut Nandang, sejauh ini pola kemitraan pada industri kayu berjalan adil karena industri kayu tak bisa semena-mena pada mitra. “Di Pulau Jawa banyak sekali industri kayu. Bila mempermainkan mitranya, gampang sekali mitra lari pada industri lain,” katanya. Beda dengan pola kemitraan yang jumlah perusahaan intinya segelintir sehingga perusahaan inti bisa memainkan harga.***

